

MENUJU PENDIDIKAN KEPROFESIAN DI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR UNIVERSITAS UDAYANA

I Wayan Wiryawan
Arsitektur Udayana, Bukit Jimbaran, Indonesia, 80361
wiryawan@unud.ac.id

ISU KURIKULUM

Penerapan Pasar Bebas ASEAN di akhir tahun 2015 membuat persaingan memasuki dunia kerja menjadi lebih keras di tahun-tahun sesudahnya. Tantangan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing secara terbuka di tingkat global yang juga meliputi bidang arsitektur, seiring dengan perubahan situasi global dan nasional disegala bidang yang juga cepat. Dunia pendidikan tinggi bidang arsitektur perlu segera menyikapi perubahan tersebut, terutama pada standar pendidikannya. Dalam organisasi profesi juga terdapat aturan main yang disepakati bersama, seperti piagam yang dikeluarkan oleh Unesco melalui UIA (Union International of Architect) yang disebut sebagai “Charter for Architectural Education” untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi arsitek profesional, ditetapkan beberapa kompetensi yang wajib dijadikan acuan secara internasional.

Pendidikan arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Udayana saat masih mengikuti pola pendidikan sarjana yang ditetapkan waktunya sampai 8 semester yang ditempuh dalam 4 tahun (144 SKS). Dengan demikian untuk mewujudkan lulusan yang siap menjadi arsitek profesional, dan dapat diakui dan disetarakan dengan profesi yang sama di tingkat dunia maka jenjang Profesi Arsitek (PPAr) dan atau Program Magister alur Desain menjadi sangat diperlukan.

STRATEGI

Arsitektur Udayana sebagai lembaga pendidikan perlu merespons apa yang menjadi tantangan global dan nasional tersebut. Penekanannya tidak lagi kepada sumber daya manusia, tetapi kepada situasi yang perlu disikapi. Tambahan lagi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek tanggal 11 Juli 2017 lalu, semakin menuntut pendidikan tinggi bidang arsitektur untuk menstrukturkan kembali standar pendidikan dan kurikulumnya. Penyempurnaan Kurikulum 2012 menjadi Kurikulum 2017 merupakan suatu upaya PSA Unud harus berbenah dan menyesuaikan dengan tuntutan tersebut.

Kurikulum Program Studi Arsitektur Udayana Tahun 2017 ini juga membuka ruang menuju visi PPArs dan Program Magister, mengacu kepada dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang dunia pendidikan arsitektur menggunakan acuan kompetensi dari APTARI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia), sedangkan acuan dari dunia profesional arsitektur adalah KAAB (*Korea Architectural Accrediting Board*) dan IAI (Ikatan Arsitek Indonesia). Penyusunan Kurikulum 2017 mengikuti struktur Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT)) dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Program Profesi Arsitektur Udayana dalam proses penyusunan proposal ataupun pengajuan ijin pendirian, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti: sumber daya manusia, tata pamong, tata kerja sama dengan berbagai pihak, tata kelola sarana dan prasarana, potensi calon peserta, dan berbagai aspek lainnya.

AKREDITASI

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan secara terorganisir dan tersistematisasi baik, kini di Unud telah dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT). Untuk melaksanakan sistem tersebut, Unud memiliki Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana, disingkat BPMU.

Total Quality Management (TQM) di bidang akademik, Unud memperhatikan dan menerapkan:

1. perbaikan mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement);
2. menentukan standar mutu (quality assurance); perubahan kultur (change of culture);
3. perubahan sistem organisasi (upside-down organization); mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer). Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal pokok di atas, Unud telah menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu, menyusun manual mutu, menyusun beberapa dokumen implementasinya (manual prosedur, instruksi kerja, borang, dll);
4. mensosialisasikan standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen pada internal stakeholders dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, manual serta dokumen dimaksud.

KERJASAMA PT DENGAN ASOSIASI PROFESI

PSA Udayana memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Asosiasi Profesi yaitu Ikatan Arsitek Indonesia, yang ditegaskan dengan MOU antara UNUD dengan IAI Nasional. Begitu juga hubungan baik dengan organisasi profesi di tingkat daerah terus dibina, termasuk hubungan dengan arsitek profesional secara perorangan maupun badan usaha. Sementara saat ini hubungan kerjasama ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama seperti kegiatan seminar, pameran, dan pengabdian masyarakat. Kerjasama ini akan terus dikembangkan lebih jauh untuk berbagai kemungkinan yang lain selama dalam koridor etis dan dibenarkan secara legal, termasuk dalam pendidikan Profesi Arsitek.

SIMPULAN

Melihat berbagai potensi dan kendala yang dimiliki oleh PSA Udayana, ada beberapa catatan yang memerlukan diskusi, pemikiran, arahan lebih lanjut dalam pelaksanaan PPARs seperti: bagaimana implementasi dari UU No 6 Tahun 2017 dan aturan pelaksanaan lainnya dalam penyusunan kurikulum dan proses pendidikan Program Profesi Arsitektur, bagaimana format tata kelola sumber daya manusia jika melibatkan arsitek profesional (bukan dosen tetap) sebagai pengajar dalam proses pendidikan program profesi arsitektur, dan bagaimana format teknis kerjasama atau keterlibatan lembaga profesi dengan kampus dalam operasional atau proses pendidikan. Dan hal lain perlu dipertajam dan dikembangkan secara teknis yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan, dan mewujudkan arsitek profesional seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Kurikulum arsitektur 2022

Konstestasi edukasi dan profesi

oleh. Antonius Karel Muktiwibowo

Arsitektur Udayana, Bukit Jimbaran, Indonesia, 80361

Pendidikan arsitektur Indonesia memiliki perkembangan yang cukup menarik baik dari sejarah maupun metode pendidikannya. Masing-masing institusi penyelenggara memiliki kurikulum pendidikan arsitektur yang tidak seragam, walaupun ada sebagian memiliki kemiripan acuan atau kerangka kurikulum berdasarkan rekam jejak dan latar belakang pendidikan pengajar dan pengelolanya. Keanekaragaman kurikulum memang tidak dilarang secara tegas oleh Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia akan tetapi akan menimbulkan sedikit masalah apabila dihadapkan pada standarisasi pendidikan arsitektur apalagi diperumit dengan gengsi, kontestasi dan keengganan masing-masing institusi. Logika sederhananya, bagaimana bisa menciptakan standar sarjana arsitektur Indonesia yang sama apabila masing-masing lulusan dididik dengan cara dan bahan yang berbeda. Dari hasil rekap diskusi dan paparan rapat aptari yang sudah diselenggarakan, terlihat suatu pola kontestasi edukasi yang jelas, berulang dan cenderung belum menemukan titik temu, bahkan hingga sekarang belum ada satu model kurikulum arsitektur yang standar, sama dan bisa diterapkan di semua institusi di seluruh Indonesia.

Perdebatan kurikulum arsitektur mestinya segera dihentikan dengan memunculkan kerangka kurikulum arsitektur yang jelas yang seragam dan diterapkan khususnya pada mata kuliah inti, pendukung dan penunjang. Dari beberapa perbandingan institusi pendidikan arsitektur terbesar dan terbaik di Indonesia saja, terlihat adanya perbedaan struktur kurikulum dan standar capaian di studio perancangan arsitektur hingga jenis tugas akhirnya. Apabila mata kuliah inti saja berbeda, bagaimana dengan matakuliah penunjang, pendukung dan pencirinya, pasti akan terdapat deviasi yang cukup besar pada output lulusannya. Perbedaan dan mungkin juga bagian dari persaingan pendidikan ini harus segera diselesaikan karena tantangan besar berikutnya harus dihadapi yaitu bagaimana capaian lulusan arsitektur dapat memenuhi tiga belas point kompetensi Ikatan Arsitek Indonesia.

Apabila dicermati ada dua kesenjangan dalam standarisasi 13 point IAI. Yang pertama adalah ketidaksesuaian internal dari point-point kompetensi IAI dimana seorang arsitek muda belum tentu dan tidak harus memiliki ke tiga belas kompetensi tersebut untuk dapat disertifikasi secara profesi menjadi seorang arsitek. Yang kedua adalah kemungkinan adanya penjurusan atau pilihan mahasiswa arsitek disaat kuliah sehingga beberapa kompetensi yang dicanangkan tidak dapat dikuasai secara maksimal. Secara obyektif kritik terhadap 13 kompetensi IAI harus dilakukan secara internal di IAI sebelum dihadapkan dengan kompetensi lulusan sarjana arsitektur. Apabila dilihat dari sejarahnya, kompetensi lulusan arsitektur lebih muncul pertama tentu saja kriteria kompetensi IAI yang harus menyesuaikan dengan profil lulusan arsitektur yang sudah ada, tentu saja beberapa perspektif dan diskusi mengenai hal ini banyak sekali dan harus segera diselesaikan.

Pertemuan APTARI tentu saja menjadi jembatan yang baik untuk mendiskusikan kontestasi yang terjadi diantara institusi pendidikan arsitektur di Indonesia dan sekaligus menjembatani gap ataupun konflik kepentingan antara institusi pendidikan dan organisasi profesi Arsitektur. Jadi penyelesaiannya

ya harus melalui diskusi intensif antara Organisasi Profesi dan Organisasi Pendidikan. Tentu saja, saya berharap hal ini sudah pernah dilakukan, akan tetapi apabila pernah dilakukanpun, belum tentu hasilnya akan maksimal, karena diskusi, seminar dan kesepakatan yang dilakukan masih belum menjawab tantangan beberapa tahun mendatang. Penyebab kekurangan hasil capaian diskusi aptari dan IAI yang terkini dapat dikategorikan menjadi tiga faktor yaitu paradigma, waktu dan tantangan global.

Faktor yang pertama adalah paradigma, yang saya maksud disini adalah pola pikir atau perspektif pendidikan arsitektur yang mungkin cenderung dipikirkan oleh generasi yang memiliki pola pikir pedagogik lama berdasarkan pengalaman dan pendidikan yang diterimanya. Hal ini cukup berbahaya karena kenyataannya apabila kebijakan dan perencanaan hanya berdasarkan pengalaman dan paradigma lama maka hasil yang dihasilkan sudah dapat dipastikan tidak bisa menjawab tantangan-tantangan baru yang akan dihadapi oleh lulusan arsitektur. Contoh sederhana apabila matakuliah yang diajarkan dipendidikan arsitektur tidak dapat dinilai kegunaannya bagi mahasiswa dan arsitek jaman now (saat ini), bagaimana mungkin materi perkuliahan tersebut mendapat perhatian mahasiswa dan memiliki kegunaan disaat mereka lulus nanti tahun 2022. Paradigma baru tentu saja bukan 'blackbox' melainkan transparent 'future' complex box. Disini faktor penting kedua yang berkaitan dengan waktu muncul. Waktu merupakan komoditi didunia yang tidak dapat diperbarui jadi harus digunakan dan dipertimbangkan dengan cepat. Teknologi di dunia sudah sangat maju, berikut pula dengan teknologi yang berkaitan dengan perancangan. Software dan hardware yang sudah ada sekarang dapat merancang apapun dengan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi dulu. Arsitektur harus membuka mata, sekarang sudah mulai jaman AI (artificial Intelligent), Big Complex Data Analysis, robot, Nano dan advance building material, Cloud, automatitation, dan Terrabyte Internet communication. Siapkah Kurikulum arsitektur sekarang menjawab tantangan ini, para arsitek luar siap membawa pasukan perancangannya dengan kemampuan tersebut, apabila kita tidak siap ya siap-siap jadi arsitek drafter saja dengan disewa sertifikat arsitek mudanya. Inilah tantangan global beberapa tahun mendatang, selain dari kompleksitas tantangan juga kecepatan proses menjadi harapan dari profil arsitek mendatang. Tantangan global terbesar tentu saja adalah borderless world. MEA mungkin didengung-dengungkan oleh pemerintah beberapa tahun lalu, walaupun sebenarnya praktek arsitek asing atau tenaga kerja asing di bidang perancangan sudah terjadi beberapa dekade lalu, bukan akan terjadi. Semua terjadi dibalik tangan dengan dokumen hukum yang lengkap sehingga batasan tenaga kerja asing dan lokal tidak terlihat jelas di mata pemerintah.

Saya sangat berharap banyak pada rapat APTARI saat ini dapat membuat satu kesepakatan yang jelas dan bersesuaian dengan IAI baik dari segi kurikulum pendidikan maupun profil yang diharapkan, yang penting cepat dan mudah dilaksanakan oleh institusi pendidikan, IAI dan mahasiswa sebagai calon arsitek. Standarisasi dan diskusi yang rumit dan berkepanjangan akan buang-buang waktu saja bagi kita semua apabila diujung akhirnya juga tidak bisa menghasilkan lulusan arsitek berprofesi yang 'laku' di dunia nyata di era millennial. Konsep kurikulum pendidikan arsitektur 4+1 bila disepakati silahkan, tapi saya tetap berharap mahasiswa dapat menyelesaikannya semuanya (pendidikan arsitektur dan profesi) kurang dari empat tahun sudah bisa bekerja dan hidup mandiri di masyarakat. Lama masa pendidikan semestinya berbanding lurus dengan jaminan, penghasilan yang akan diterimanya saat lulus nantinya. Apabila mahasiswa Akuntansi, IT dapat lulus dibawah empat tahun dan mandiri di tahun keempat maka tanggung jawab sosial pendidikan arsitektur semestinya di taraf yang sama. Stop berkontestasi, mari bersolusi mengatasi tantangan dan memberikan kepastian hidup lulusan arsitektur mendatang.